



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA DAERAH DI SUMATERA UTARA
TAHUN 2017**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi Islam*

Oleh

**FAISAL ABDAOE. R
NIM. 13 230 0013**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH DI SUMATERA UTARA
TAHUN 2017**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi Islam*

Oleh

**FAISAL ABDAOE. R
NIM. 13 230 00013**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 2003121 002

PEMBIMBING II

Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122201801 2 003

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Faisal Abdaoe. R**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 30 April 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Faisal Abdaoe. R** yang berjudul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. NIP. 19720313 2003121 002

PEMBIMBING II

Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122201801 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Abdaoe. R

NIM : 13 230 0013

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2017**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 06 Juni 2018

Saya yang Menyatakan,

A 6000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp is yellow and green, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI KEPPEL', 'F8AFF077163861', and '6000 RUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

Faisal Abdaoe. R
NIM. 13 230 0013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Abdaoe. R
NIM : 13 230 0013
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exsclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2017**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 06 Juni 2018
Yang menyatakan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is green and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI KEPOLISIAN' and '6000 RUPIAH'. The signature is in black ink and appears to be 'Faisal'.

Faisal Abdaoe. R
NIM. 13 230 0013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : FAISAL ABDAOE. R
NIM : 13 230 0013
**JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.**

Ketua

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris

Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

Anggota

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP.19800605 201101 1 003

Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Sabtu/30 Juni 2018
Pukul : 14.00 s/d 17.00 WINB
Hasil/Nilai : Lulus/72,75 (B)
IPK : 3,25
Predikat : Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan22733
Telp. (0634)22080Fax. (0634)24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017.

NAMA : FAISAL ABDAOE. R
NIM : 13 230 0013

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 16 Juli 2018
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur *Alhamdulillah* peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti sanjung tinggikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat kelak.

Untuk menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2017”**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun immaterial, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Darwis Dasopang ,M.Ag sebagai wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Anhar, M.A sebagai wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak drs. Kamaluddin Ritonga, M.Ag selaku

wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A sebagai Plt prodi Ekonomi Syariah serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag merupakan pembimbing I dan Ibu Nurul Izzah Lubis, M.Si merupakan pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarah, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta (Ayahanda Yahya Ritonga, S.pd dan Ibunda tercinta Rosmaini Rangkuti) yang telah membimbing dan selalu memanjatkan doa yang tiada hentihentinya, serta berjuang demi kami anak dan borunya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Terimakasih doa dari Kakak-kakak saya (Elda Hotdian Ritonga, A.Md dan Diani Leo Marlina Ritonga, A.Md) yang paling berjasa dalam hidup Peneliti yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moral dan material demi kesuksesan Peneliti. Do'a dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surgaNya.
8. Sahabat-sahabat terbaik peneliti Irsan saputra Harahap SE, Umaruddin Nur Nadeak, Ranga Mulia, Jokkas Hot Hutajulu, Taufik Walhidayat Hasibuan SE, Abu Bokar SE, Andri Eka Putra SE, Risky Abdullah, Muhammad Noval dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan dalam kesempatan ini yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan kepada peneliti agar tak berputus asa, dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2013, khususnya Ekonomi Syariah-1 yang selalu memberi dukungan, semoga kita semua sukses dalam meraih impian dan cita-cita, amiiin.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah bapak/ibu dan saudara-saudari berikan amat sangat berharga, peneliti mungkin tidak dapat membalasnya dan tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti, sehingga peneliti masih perlu mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penulisan ilmiah ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, 06 Juni 2018

Peneliti



FAISAL ABDAOE. R
NIM. 13 230 0013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda Huruf dan	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
	fathahdanalifatauya	ā	a dangarisatas

ي...ى	Kasrahnya	ī	i dangaris di bawah
و...و	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : FAISAL ABDAOE. R
NIM : 13 230 0013
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Hubungan keuangan pusat-daerah merupakan satu pengetahuan yang penting di kalangan praktisi pemerintahan maupun mahasiswa serta masyarakat yang berminat terhadap keuangan publik yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan terhadap daerah dalam menutupi Belanja daerah dan potensi fiskalnya yang tidak memadai. Landasan hukum hubungan keuangan pusat-daerah diperkuat oleh Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 tahun 2004, lebih menegaskan bahwa untuk pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian Daerah Dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pada buku Prof. Dr. Djaenuri Aries H.M., M.A : besarnya alokasi Belanja Daerah ditentukan oleh pendapatan, potensi fiskal di suatu daerah serta kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam mengelola dana perimbangan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, pembangunan dan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah provinsi di Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data cross section yang berjumlah 33 sampel pada tahun 2017 yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui uji Asumsi Klasik dan Regresi Berganda menggunakan SPSS 21.

Hasil dari estimasi penelitian ini menunjukkan bahwa Uji F test antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah secara bersama-sama terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa nilai F-hitung (P value) $1221,931 > F\text{-Tabel } 3,28$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Kemudian secara parsial kedua variabel bebasnya juga berpengaruh dengan nilai t-hitung untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} (19,394 > 2,034)$, (dilihat pada $t_{\text{tabel}} N 33$ dengan taraf signifikan $0,05$). Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara tahun 2017. Kemudian untuk nilai t-hitung Dana Alokasi Umum sebesar $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} (18,650 > 2,034)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Prvinsi sumatera Utara tahun 2017.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Definisi Operasional Variabel	10
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kerangka Teori	14
1. Pendapatan Asli Daerah.....	14
2. fungsi, Pengelompokan, Tata Cara Pemungutan Pajak	18
3. Dana Alokasi Umum	23
4. Belanja Daerah.....	25
6. Pendapatan Dalam Perspektif Islam.....	28
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pikir	33
D. Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	38

E. Metode Analisis Data.....	39
1. Uji Asumsi Klasik.....	39
a. Uji Normalitas	39
b. Uji Multikolinearitas	40
c. Uji Heterokedastisitas.....	41
d. Uji Autokorelasi	42
2. Regresi Berganda	43
3. Uji Statistik - t.....	44
4. Uji Statistik - F.....	44
5. Uji Koefisien Determinasi.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara	46
1. Profil dan Gambaran provinsi Sumatera Utara	46
2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara.....	49
B. Gambaran Umum Variabel Penelitian	50
1. Pendapatan Asli Daerah	50
2. Dana Alokasi Umum.....	52
3. Belanja Daerah.....	54
C. Hasil Analisis Data	58
1. Uji Normalitas.....	58
2. Uji Multikolinearitas.....	59
3. Uji Heterokedastisitas	61
4. Uji Autokorelasi.....	63
5. Analisis Regresi Berganda.....	64
6. Uji Statistik - t.....	66
7. Uji Statistik – F.....	67
8. Uji Koefisien Determinasi.....	68
D. Pembahasan Hasil Penelitian	69
E. Keterbatasan Penelitian.....	72
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 PAD, DAU dan Belanja Daerah Tahun 2017 Di Sumatera Utara	3
Tabel I.2 Definisi Operasional Variabel	10
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel III.1 Kriteria Pemilihan Sampel	39
Tabel III.2 Keputusan Uji DW (Autokorelasi)	43
Tabel IV.1 Kabupaten/Kota & Pusat Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara	49
Tabel IV.2 PAD Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017	52
Tabel IV.3 DAU Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017	54
Tabel IV.4 Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017	57
Tabel IV.5 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov (Normalitas)	59
Tabel IV.6 Hasil Uji Multikolinearitas	61
Tabel IV.7 Hasil Uji Heterokedastisitas (Spearman's Rho)	63
Tabel IV.8 Hasil Uji Autokorelasi	65
Tabel IV.9 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	66
Tabel IV.10 Hasil Uji Statistik – t.....	67
Tabel IV.11 Hasil Uji Statistik - F.....	69
Tabel IV.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar IV.1 Hasil Uji Grafik Normal Probability P- Plot	60
Gambar IV.2 Hasil Uji Grafik Scatterplot (Heterokedastisitas).....	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2011
- Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov Smirnov*)
- Lampiran 3 Hasil Uji *Normal Probability P- Plot*
- Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 5 Hasil Uji Heterokedastisitas (*Spearman's Rho*)
- Lampiran 6 Hasil Uji Grafik Scatterplot (Heterokedastisitas)
- Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi (*Durbin Watson*)
- Lampiran 8 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
- Lampiran 9 Hasil Uji – t Statistik
- Lampiran 10 Hasil Uji – F Statistik
- Lampiran 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan keuangan Pusat dan Daerah dimaksudkan agar dapat membentuk satu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat lebih mempunyai kebebasan dalam menentukan nasib sendiri terhadap pembuatan kebijakan. Akan tetapi dalam hal hubungan antara pemerintah pusat dan daerah cenderung lebih menguntungkan pemerintah pusat.

Transparans dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Sesuai dengan teori agensi, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

¹ Fransisca Roosiana kurniawati, *Pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten di indonesia* : 2010

² Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm. 338.²Ibid .

Pembagian kekuasaan dengan asas desentralisasi (penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia), maka tujuan dari otonomi daerah itu sendiri menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki. Namun hal demikian baru bisa dicapai melalui perekonomian yang baik, teratur dan terencana.³

Kemudian untuk mencapai keadaan demikian itu harus dilakukan peningkatan keadaan ekonomi dan peningkatan moral rakyatnya melalui suatu pembangunan, karena dasar pembangunan yang baik ialah pembangunan terencana.

Pada konteks ini peneliti akan meneliti seberapa besar pengaruh PAD dan DAU terhadap pengeluaran atau belanja daerah dan mana yang lebih kuat pengaruhnya terhadap Belanja Daerah. Jika PAD nya lebih berpengaruh maka kabupaten/kota tersebut sudah mampu mandiri atau dapat dikatakan sudah sukses dalam mengelola pendapatan serta pengeluaran daerahnya sendiri dapat dikatakan otonom. Kemudian jika DAU lebih tinggi dibanding PAD, maka kabupaten atau kota tersebut belum mampu sepenuhnya mandiri dalam mengurus pendapatan dan pengeluaran daerahnya sendiri. Berikut ini tabel perbandingan PAD, DAU dan Belanja daerah di sebagian Kabupaten/ Kota provinsi Sumatera Utara :

³ Muluk, Khairul, M.R. 2007. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang :Bayu Media Publishing.

Tabel I. 1
PAD, DAU dan Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2017

No.	Kabupaten/ Kota	PAD	DAU	Belanja Daerah
1	Kota Binjai	98.283.092	574.469.158	914.618.290
2	Kota Medan	1.973.780.338	1.611.940.995	5.493.560.943
3	Kota Pematang Siantar	116.508.915	593.532.667	1.063.470.020
4	Kota Sibolga	78.454.412	412.805.887	631.329.596
5	Kota Tanjung Balai	65.315.421	418.850.996	693.917.029
6	Kota Tebing Tinggi	97.353.698	428.475.763	737.568.472
7	Kota Padang Sidempuan	91.296.998	507.686.451	836.868.161
8	Kab. Pakpak Bharat	24.297.176	342.284.663	681.429.146
9	Kab. Nias Selatan	14.160.411	543.052.446	1.147.761.807
10	Kab. Humbang Hasundutan	41.679.310	571.801.064	983.547.634
11	Kab. Serdang Bedagai	102.479.860	774.457.677	1.386.104.799
12	Kab. Samosir	50.000.000	476.191.394	902.089.052
13	Kab. Batu Bara	51.590.500	646.547.539	1.063.041.449
14	Kab. Padang Lawas	52.299.754	525.591.211	1.096.235.641
15	Kab. Padang Lawas Utara	35.150.441	572.675.409	1.177.450.468
16	Kab. Labuhanbatu Selatan	41.169.542	513.547.168	878749129947
17	Kab. Labuhanbatu Utara	43.182.972	593.232.429	849.301.959
18	Kab. Nias Utara	32.005.000	411.036.299	775.830.169
19	Kab. Nias Barat	28.740.000	347.545.033	652.595.950
20	Kota Gunungsitoli	34.937.400	434.259.520	723.761.500

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kota Binjai jumlah PAD terhadap Belanja Daerah hanya Rp. 98.283.092 dibandingkan dengan jumlah DAU Rp. 574.469.092 yang lebih tinggi perannya terhadap nilai dari Belanja Daerah sebesar Rp. 914.618.290 Begitu juga dengan Ibukota Provinsi Medan yang seharusnya mampu menutupi Belanja Daerahnya dengan PAD namun masih mengandalkan DAU. Nilai PAD berkisar Rp. 1.973.780.338 sedangkan nilai DAU sebesar Rp. 1.611.940.995 dengan nilai dari Belanja Daerah sebesar Rp. 5.493.560.943 di Kota Pematang Siantar yang berdekatan dengan Ibukota juga masih mengandalkan DAU dimana

nilainya sebesar Rp. 593.532.667 sedangkan untuk nilai PAD tersebut relatif lebih rendah terhadap nilai Belanja Daerah sebesar Rp. 116.508.915 begitu pula dengan Kota Sibolga dan Kota Tanjung Balai yang dapat dilihat pada tabel diatas. Jadi, Kota di Provinsi Sumatera Utara saja masih bergantung terhadap DAU, bagaimana pula dengan 25 kabupatennya.

Berdasarkan daerah Kabupaten juga demikian, masih sangat bergantung terhadap Dana Alokasi Umum untuk memenuhi Belanja Daerahnya. Nilai PAD dan DAU terendah berada di Kabupaten Nias Barat, jumlah PAD sebesar Rp. 28.740.000 dan DAU sebesar Rp. 347.545.033 kemudian nilai Belanja Daerahnya yang begitu tinggi sebesar Rp. 652.595.950. Nilai PAD tersebut tidak sampai 1/3 dari nilai Belanja Daerahnya. Kemudian nilai PAD terendah kedua berada di Kabupaten Nias Utara dimana jumlah PAD sebesar Rp. 32.005.000 dan DAU sebesar Rp. 411.036.299 dengan Belanja Daerah sebesar Rp. 775.830.169 . Hampir di seluruh Kabupaten juga mengalami hal yang sama dengan Kabupaten Nias Barat dan Nias Utara.

Sehingga peristiwa ini bertolak belakang dengan banyaknya pemekaraan beberapa daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara, yang mana tujuan dari mengotonomkan suatu kabupaten/kota agar dapat mandiri baik secara finansial, sosial dan ekonomi. Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam membantu anggaran dana pembangunan ataupun pengeluaran pemerintah daerah

lainnya bukan untuk menambah beban dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang merata. Salah satu instrument sekaligus faktor penting bagi keberhasilan pembangunan daerah adalah manajemen belanja daerah, yang tercermin melalui APBD.

Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja pemda dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang muncul adalah saat pemda dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar. Sementara pada saat bersamaan pemda kurang memiliki kreativitas mengelola APBD, sehingga pemerintah pada jenjang di atasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD.¹⁴

Pada saat yang bersamaan jumlah pendapatan daerah meningkat (baik dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer) tetap saja belanja daerah belum mampu secara optimal meningkatkan kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Hal itu mengingat kunci persoalan rendahnya komitmen

⁴ <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/269602-bank-dunia-RI-hadapimasalah-belanja-modal>). Diakses pada 18 Desember 2017, jam 19.00.

untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah melalui belanja modal yang cukup, belum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah.¹⁵

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan PAD tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.⁶

Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui kemakmuran yang berkeadilan.

Pembangunan ekonomi daerah masih dihadapkan masalah-masalah yang menghambat daerah dalam proses pembangunan yang berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi terutama kesejahteraan masyarakat. Adapun masalah tersebut di antaranya adalah belanja daerah masih lebih banyak digunakan untuk belanja rutin (belanja yang tidak produktif)

⁵<http://www.suaramerdeka.com>. (diakses : 22/12/2017, jam : 09;38)

⁶ Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. "Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi". Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1).

sehingga belanja modal untuk menambah asset atau infrastruktur penggerak roda perekonomian daerah di nomor 2 kan, serta kurang menggali potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Untuk itu masalah penerimaan dan pengeluaran (kebijakan fiskal) di kabupaten Provinsi Sumatera Utara ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas dan dicari pemecahan masalahnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah DAU yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.¹⁷

Hampir dari keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara masih cenderung bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, dimana ini bertolak belakang dengan tujuan dari otonomi (pemekaran) daerah yaitu mandiri dalam mengelola sumber daya daerahnya,

¹⁷Arbie gugus wandira. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012)*. Dalam Jurnal : Universitas negeri Semarang.

pembangunan infrastruktur dan pengeluaran daerah lainnya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 33 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis judul proposal akan membahas tentang apakah ada pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017.

C. Batasan Masalah

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota Besar di Sumatera Utara Tahun 2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat ditarik permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017?

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD secara simultan terhadap Belanja Daerah tahun 2017.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang belanja daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah secara proporsional dan disajikan

secara transparan sehingga dapat terwujud good governance, bukan hanya secara kuantitas saja namun juga secara kualitas nyata dikemanakan alokasi anggaran tersebut.

3. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak IAIN pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan penelitian berikutnya, yang akan membahas hal yang sama dengan judul ini.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang menyatakan secara jelas dan akurat suatu variabel yang dapat diukur. Dapat pula dikatakan sebagai suatu penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mengukur suatu variabel. Definisi operasional variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel .2 di bawah ini.

Tabel I. 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pendapatan asli daerah	Akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas tanah 2. Pendapatan wajib pajak 3. Jumlah penduduk dan Potensi ekonomi 4. Kondisi geografis daerah dan panjang jalan yang diurus oleh daerah. 	Rasio

	Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah	5. Tingkat kemahalan dan inflasi daerah.	
Dana alokasi umum	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dari APBN 2. Pembangunan ekonomi daerah 3. Kebijakan desentralisasi 4. Daerah miskin dengan potensi PAD rendah 	Rasio
Belanja daerah	Semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja rutin 2. Pengeluaran transfer 3. Pengeluaran tidak tersangka 4. Belanja Investasi/ belanja modal 	Rasio

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab. Hal ini dimaksud untuk penelitian laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional variabel, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini berisi kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis. Pada Bab ini dikhususkan membahas tentang teori mengenai variabel-variabel penelitiannya serta yang terkait dengan variabel penelitiannya.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, model data panel dan metode analisis data. Pada Bab ini lebih fokus membahas tentang pengumpulan datanya dan cara analisis data yang dilakukan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini akan berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pengaruh Pendapatan asli daerah dan Dana alokasi umum terhadap Belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan peneliti mengenai judul skripsi yang diangkat oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.¹

Pada buku Prof. Dr. Djaenuri Aries H.M., M.A : Besarnya alokasi Belanja Daerah ditentukan oleh pendapatan, potensi fiskal di suatu daerah serta kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam mengelola dana perimbangan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, pembangunan dan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah provinsi di Indonesia.

Sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2004 pasal 79 pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah dan disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:²

1. Pajak Daerah

¹ Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

² UU nomor 33 tahun 2004 pasal 79

Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel dan Restoran
- 2) Pajak Hiburan
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- 5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- 6) Pajak Parkir

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, mendapat balas jasa langsung. Retribusi dibagi atas tiga golongan:³

- a. Retribusi jasa umum
 - b. Retribusi jasa usaha
 - c. Retribusi perizinan tertentu
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD. BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan di bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam

³Halim, Abdul.2001. *Bunga Rampai manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.⁴

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hasil usaha daerah lain yang sah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Pasal 79 UU 22/1999 mengisyaratkan dalam penyelenggara fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah Kabupaten/Kota, dengan kata lain, diharapkan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus selalu

⁴ Damang, 2011. *Pendapatan Asli Daerah*. Artikel. <http://www.pendapatan-asli-daerah-negara-hukum.com>.

menggantungkan dana (anggaran) dari pusat melalui pembangian dana perimbangan.⁵

5. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.⁶

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

2. Fungsi, Pengelompokan dan Tata cara pemungutan Pajak

Pajak sebagai sumber penerimaan Negara lebih tepatnya aset Negara yang digunakan untuk kelangsungan pembangunan yang merata bagi setiap daerah dan juga sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah.

⁵ Pasal 79 UU 22/1999

⁶ Ikhsan, M., Santosa Agus, & Harmanti. 2006. *Administrasi Keuangan Publik*, Jakarta : Universitas Terbuka

Sebagai kontribusi wajib, iuran yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah akan mempercepat pembangunan di suatu negara.

Namun, bila banyaknya penunggakan iuran masyarakat kepada pemerintah maka akan terhambatnya pembangunan di suatu Negara. Karenanya besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat memengaruhi pola laku produksi dan atau konsumsi.⁷

a. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Secara umum, pajak memiliki 4 fungsi, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi anggaran merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan Negara. Biasanya, penerimaan pajak sebagai pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam APBN.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Selain mengemban fungsi penerimaan Negara, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, untuk melindungi produksi dalam negeri, Negara dapat menerapkan tarif bea masuk: agar daya beli rakyat

⁷Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro ekonomi & Makro ekonomi)* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, 2008), hlm. 445.

berpenghasilan rendah terjaga, Negara dapat memberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah: dan sebagainya.

Pajak dengan berbagai fasilitas dan keringanan yang ditawarkan juga menjadi sarana efektif untuk menjaga stabilitas dan menjadi alat redistribusi pendapatan yang baik. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil, dan dukungan aparatur yang profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan dapat berdaya guna. Pajak yang dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama.⁸

3) Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan Negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, di Indonesia sendiri keempat fungsi pajak tersebut, umumnya pemerintah hanya menggunakan 2 fungsi

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan* (yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 1.

pajak saja sebagai penerimaan Negara yaitu Fungsi Anggaran (Budgetair) dan Fungsi Mengatur (Regulerend).⁹

b. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak terdiri dari:

a) Menurut golongan:

(1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan.

kepada orang lain.

Contohnya : pajak penghasilan.

(2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : pajak pertambahan nilai.

b) Menurut sifatnya:

(1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contohnya : pajak penghasilan.

(2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib pajak. Contohnya: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c) Menurut lembaga pemungutannya:

(1) Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya:

⁹Dina Angraini, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah diakses selasa 20 Desember 2017 jam 02:20 wib.

pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

- (2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari :
- (a). Pajak Propinsi, contoh; pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - (b). Pajak kabupaten/kota, contoh; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.¹⁰

c. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitas. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan diketahui).

b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

¹⁰Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.¹¹

3. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi

¹¹Sugianto, *Pajak & Retribusi daerah (Pengelolaan Pemerintahan Daerah dalam aspek Keuangan, Pajak & Retribusi Daerah)*, Jakarta:Grasindo,2017.

hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.¹²

Ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.¹³

Menurut UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada

¹²Anjar Setiawan, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Hlm ; 40.

¹³Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.¹⁴

Kebutuhan fiskal dapat diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam perhitungan DAU, kebutuhan daerah tersebut dicerminkan dari variabel-variabel kebutuhan fiskal sebagai berikut :¹⁵

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
- d. Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Potensi penerimaan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD dengan DBH Pajak dan SDA yang diterima oleh daerah. Berdasarkan UU diatas, setiap daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal maka dapat menerima penurunan DAU, dan atau tidak menerima sama sekali pada tahun berikutnya. Dasar inilah

¹⁴Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

¹⁵Sirait, Robby Alexander. 2009. *Desentralisasi fiskal Dana Alokasi Umum*. <http://www.bloggersumut.robbyalexandersirait.com>. Diakses pada 19 desember 2017. Pukul 19.00. Hlm ; 20.

yang digunakan pemerintah untuk memberikan predikat daerah “kaya” (DKI Jakarta, Riau dan Kaltim) dan memperoleh penghapusan.

4. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain. Belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer dan pengeluaran tidak tersangka.¹⁶

1. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset kekayaan bagi daerah, belanja rutin terdiri dari:

Belanja administrasi umum:

¹⁶Anjar Setiawan, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*. Dalam *Jurnal Universitas Diponegoro*, Hlm ; 50.

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Belanja Pemeliharaan
- e. Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum

2. Belanja Investasi/Modal

Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja investasi terdiri dari:¹⁷

- a. Belanja Publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
- b. Belanja Aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.

3. Pengeluaran Transfer

Pengeluaran transfer adalah pengalihan utang pemerintah daerah dengan kriteria:

¹⁷ Anjar Setiawan, *Op cit*, Hal. 51

- a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam pembelian dan penjualan.
- b. Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi. Pengeluaran transfer terdiri atas angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan.

4. Pengeluaran Tidak Tersangka

Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk pembiayaan:

- a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- b. Tagihan tahun lain yang belum diselesaikan dan / atau yang tidak tersedia anggarannya pada tahun lalu yang bersangkutan.
- c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan / atau kelebihan penerimaan.¹⁸

5. Pendapatan Dalam Perspektif Islam

Sumber pendapatan dan penerimaan pada masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin adalah pajak. Pajak itu sendiri dikenal dengan nama *zakat*, dan diperkenalkan pada tahun ke 8 Hijriah di awal-awal masa

¹⁸Anjar Setiawan, *Op cit*, Hal. 52

pemerintahan Islam dengan zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian.¹⁹

Hasil Pendapatan pemerintah Islam itu sendiri bersumber dari pajak yang kemudian Struktur Pendapatan itu sendiri terdiri dari:

1. Kharaj

Dalam penjelasan perincinya, *Ash-Shawafi* ini sebenarnya adalah harta tanah takhlukkan dan ditetapkan oleh *baitul mal*. Tanah yang dimaksud adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, tanahnya para raja, tanahnya para panglima perang, tanahnya pemilik yang lari dalam perang.

Dalam pendefenisian umumnya sering disebut *kharaj*. Istilah ini dipopulerkan oleh khalifah Umar bin Khattab pada masa Umar bin Khattab pengurus *kharaj* mulai diatur secara sistematis dan ditertipkan dengan mendirikan *diwan Al-Kharaj* hal ini sebabkan karna banyaknya daerah yang berhasil di takhlukkan termasuk tanah pertanian.²⁰

2. Ghanimah

Ganimah merupakan pendapatan Negara yang di dapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ganimah ini ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Distribusi Qanimah empat perlimanya diberikan pada para prajurit yang bertempur, sementara seperlimanya adalah khums (harta rampasan perang).

¹⁹ Adiwarmman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

²⁰ Adiwarmman Azwar Karim, *Op cit*, Hal.49

3. Ushur

Ushur ini merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Pada awalnya ushur merupakan pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang nonmuslim yang melakukan perdagangan di Negara Islam.

4. Jizyah

Secara bahasa jizyah berasal dari kalimat jaza yang berarti penggantian (kompensasi), atau balasan atas suatu kebaikan atau kejahatan. Secara terminologi jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada warga nonmuslim sebagai imbalan untuk jaminan kehidupan yang diberikan oleh Negara Islam. Jizyah dipungut oleh Negara dari warga nonmuslim yang membuat perjanjian dengan pemerintah sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintahan Islam, konsekuensi dari perlindungan, jaminan keamanan jiwa dan harta, fasilitas ekonomi, social yang diberikan pemerintah islam kepada mereka, dan sebagai kompensasi dibebaskan dari kewajiban ikut perang.

Jizyah merupakan hak yang diberikan Allah Swt kepada kaum muslimin dari orang kafir, karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. Jizyah tersebut merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun. Dalil yang digunakan dalam menetapkan jizyah ini terdapat dalam Surah At-Taubah [9]:29. Namun, menurut pandangan Islam, pada Al-Quran hanya satu kali saja kata pajak yaitu jizyah yang ada dalam terjemahan Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]:29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا

يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak (Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk).²¹

Berdasarkan ayat diatas setiap manusia hendaklah melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. Dengan membayar pajak yang telah di pungut oleh pemerintah Islam demi kelangsungan hidup bermasyarakat yang tentram, aman dan makmur.

B. Penelitian Terdahulu

Asas tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum pernah diteliti sebelumnya dan dengan kata lain dengan menelaah peneliti terdahulu seseorang akan mudah menelokalikasi kontribusi yang akan di buatnya. Suatu permasalahan yang muncul biasa karena sulit ditemukannya penelitian yang sejenis, kemudian peneliti baru menyatakan bahwa penelitiannya benar-benar baru dan belum tersentuh orang lain.²²

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Bukhara Tajwid & Terjemah* (Bandung: Tipe BA 2, 2012), hlm. 282.

²² <http://Kompasiana.com>, *Penelitian Terdahulu*, diakses kamis,22:00 wib.

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran peneliti dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dalam penelitian ini, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Yovita, Farah Marta	Variabel Dependen : Belanja Modal Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum di seluruh Indonesia tahun 2011	Regresi Berganda	Pertumbuhan Ekonomi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. PAD, tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.
2	Noni Puspitasari, Idhar Yahya	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Provinsi RIAU tahun 2006	Regresi Berganda	Didapati bahwa DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja. Sedangkan PAD menunjukkan Pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi Belanja
3	Maimunah	Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau Sumatera tahun	Regresi Berganda	Besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif). Telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera

		2004		
--	--	------	--	--

Adapun persamaan atau perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut ini :

1. Yovita farah marta, persamaannya adalah variabel bebasnya sama-sama menggunakan PAD dan DAU serta metode analisis data yang digunakan sama yaitu analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS. Kemudian untuk perbedaannya yaitu pada variabel terikatnya menggunakan data Belanja modal sedangkan penulis menggunakan Belanja daerah, penelitiannya pada tahun 2011 dan penelitiannya pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
2. Noni Puspitasari dan Idhar Yahya, persamaannya adalah variabel bebas dan terikatnya sama dengan penulis. Kemudian sama-sama regresi berganda serta pengolahan datanya menggunakan SPSS. Untuk perbedaannya yaitu waktu penelitiannya pada tahun 2006 serta lokasi penelitiannya di provinsi Riau.
3. Maimunah, persamaannya adalah kedua variabelnya sama, kemudian untuk lokasi penelitiannya juga sama yaitu di kabupaten/kota Sumatera Utara. Perbedaannya yaitu terletak pada waktu penelitiannya, penulis meneliti tahun 2017 sedangkan peneliti terdahulu pada tahun 2004 dan pada jumlah Kabupaten/Kotanya.

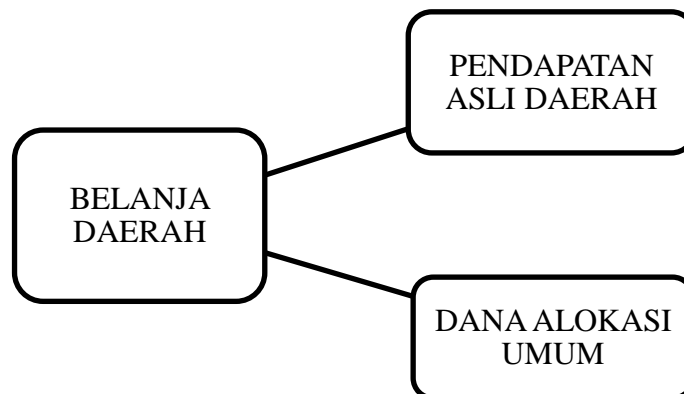
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antar variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada deskripsi teoritis. Konsep dalam hal ini merupakan

suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian.²³ Berikut ini kerangka pikir yang dibuat oleh penulis :

Gambar II. 1

Kerangka Pikir



Pada gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa PAD dan DAU merupakan salah satu yang mempengaruhi belanja daerah. Dimana apabila nilai atau jumlah PAD naik atau tinggi maka anggaran untuk belanja daerah juga akan naik dan apabila PAD nilainya turun maka belanja daerah juga akan mengalami budget yang turun. Kemudian DAU juga memiliki pengaruh yang sama seperti halnya PAD, dimana apabila nilai DAU naik maka nilai dari belanja daerah akan mengalami kenaikan dan sebaliknya.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 251.

merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut koherensi, mengingat premis merupakan informasi yang bersumber dari kenyataan yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang akan dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dari premis.²⁴ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_{01} = Tidak terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
 H_{a1} = Terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. H_{02} = Tidak terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
 H_{a2} = Terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. H_{03} = Tidak terdapat pengaruh PAD dan DAU secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
 H_{a3} = Terdapat pengaruh PAD dan DAU secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

²⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di provinsi Sumatera Utara dengan variabel PAD dan DAU sebagai variabel independen serta variabel Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan selesai.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, karena PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara masih perlu dikembangkan sebab penyumbang utama Belanja daerah masih didominasi oleh DAU dan masih banyak di Kabupaten/Kota tersebut yang masih minim infrastruktur penggerak roda perekonomiannya. Sedangkan pemilihan tahun 2017 sebagai rentang waktu penelitian didasarkan ketersediaan data.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan atau pengaruh yang terukur, meramal dan mengontrol. Penelitian ini menggunakan teknik *cross section*, yaitu data yang dikumpulkan dari satu waktu diambil dari beberapa daerah untuk menggambarkan tentang perkembangan suatu kegiatan selama periode spesifik yang diamati.¹

¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Kebijakan Lainnya) (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 48.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan adalah PAD, DAU dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun 2017.

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah merujuk sekumpulan orang, objek yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal yang membentuk masalah pokok suatu penelitian.² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data PAD, DAU dan Belanja Daerah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara dan Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia yang berjumlah 33 populasi dari tahun 2017.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.³

² Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 161.

³ *Ibid.*, hlm. 173.

Tabel III. 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Tahun
1	Data Provinsi di Sumatera Utara yang dipublikasikan melalui Wwww.dirjen-perimbangan.go.id	2017
2	Data publikasi di link Badan Pusat Statistik yaitu www.bps.go.id	2017

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data PAD, data DAU dan data Belanja Daerah di Sumatera Utara yang berjumlah 33 daerah dan dalam 1 tahun, sehingga jumlah sampel keseluruhan menjadi $33 \times 1 = 33$ data.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang kita peroleh dari sumber kedua dan biasanya data ini sudah siap pakai. Data sekunder ini mudah kita dapatkan dan tersebar luas diberbagai sumber, baik ia data-data ekonomi yang dikeluarkan pemerintah baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun dari Bank Indonesia (BI) sudah tersedia secara lengkap. Jenis data yang digunakan adalah data *cross section* dari 33 Kabupaten/Kota tahun 2017. Adapun teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh dengan:⁴

1. Studi Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih

⁴Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm.73.

lanjut dan disajikan berbagai pihak baik pihak pengumpul data atau pihak lain. Data penelitian ini diperoleh dari data Badan Pusat Statistik melalui www.bps.go.id dan www.dirjen-perimbangan.go.id yang digunakan secara panel berdasarkan runtutan waktu dan berbagai tempat pada tahun 2017.

2. Studi Kepustakaan

Uraian yang berisi tentang teori dan praktik yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk membahas relevansi antara teori dan praktik yang bersumber dari jurnal, skripsi, dan buku-buku tentang ekonomi yang terkait dengan variabel penelitian.

E. Metode Analisis Data

Tahapan analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Hal ini disebabkan secara umum data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang sebarannya normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal, dalam penelitian ini uji

normalitas dilihat melalui *normal probability plot* dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal.

Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal.⁵ Kemudian melalui uji Kolmogorov smirnov yaitu dengan membandingkan nilai absolute atau nilai K-s dengan tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan:

- Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi $> 0,05$
- Data tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansi $< 0,05$

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya menjadi terganggu. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dimana jika :

- Jika nilai Tolerance lebih $> 0,10$ maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.
- Jika nilai Tolerance $< 0,10$ maka artinya terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

⁵Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang. Hal. 36

Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor)

- Jika nilai VIF $< 10,00$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas pada data yang diuji
- Jika nilai VIF $> 10,00$ maka dapat dikatakan bahwa terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.⁶

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan kata lain Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

Uji statistik yang digunakan adalah Uji *Scatterplot* dan Uji *koefisien korelasi Spermans Rho*. Uji *Scatterplot* digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara lain nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Pada kesempatan ini penulis mengujinya melalui uji *koefisien korelasi Spermans Rho* yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual. Pengujian menggunakan tingkat

⁶ *Ibid.*, Hlm. 92.

signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi. Dengan dasar pengambilan keputusan :

- Jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikansi lebih dari $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.
- Jika korelasi variabel independennya dengan residual didapat signifikansi kurang dari $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terjadi masalah heterokedastisitas atau disebut homokedastisitas.⁷

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi dalam hal variabel independen. Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin Watson (DW test). Adapun cara mendeteksi terjadinya Autokorelasi secara umum dapat diambil patokan sebagai berikut :

Tabel III. 2
Keputusan Uji - DW

	Keputusan
$d < d_l$	Terjadi masalah autokorelasi yang positif dan perlu perbaikan
$d_l < d < d_u$	Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik
$d_u < d < 4 - d_u$	Tidak ada masalah autokorelasi
$4 - d_u < d < 4 - d_l$	Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik

⁷*Ibid.*, 106

4-dl<d	Masalah autokorelasi serius
--------	-----------------------------

- a. Angka DW di bawah -4 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Angka DW diantara -4 sampai +4 berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Angka DW di atas +4 berarti ada autokorelasi negatif.⁸

2. Regresi Berganda

Regresi berganda adalah perluasan dari regresi linier sederhana yang digunakan apabila kita bermaksud memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai dari dua atau lebih variabel lainnya. Setelah uji asumsi klasik dilakukan maka selanjutnya menganalisis regresi bergandanya.

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan PAD dan DAU terhadap belanja modal dengan melihat kekuatan hubungan antar belanja daerah dengan PAD dan DAU. Model regresi linier berganda tersebut adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

a = Konstanta atau Intersep

$\beta_1\beta_2$ = Koefisien Regresi untuk X_1 , dan X_2

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

⁸*Ibid.*, Hlm. 96

X_2 = Dana Alokasi Umum
 e = Faktor lain (Faktor Pengganggu)

3. Uji Statistik - t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%), dan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Untuk Uji t, penelitian ini membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel.⁹

Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan (n-k-1), di mana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel. Untuk tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan pengambilan keputusan :

H_{01} : PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah

H_{a1} : PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah

H_{02} : DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah

H_{a2} : DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah

4. Uji Statistik - F

Uji digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dapat dilihat jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh antara PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Sebaliknya apabila

⁹Sugiyono. *Op cit.* Hlm. 243

$F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima artinya ada pengaruh antara PAD dan DAU terhadap belanja daerah dengan pengambilan keputusan :¹⁰

H_0 : PAD dan DAU secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah

H_a : PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

5. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jika R² yang diperoleh mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis determinasi dalam regresi sederhana digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Taraf signifikansi yang digunakan adalah $\text{sig } \alpha < 0,05$. R² diperoleh dengan mengkuadratkannya melalui program SPSS 22. Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.¹¹

¹⁰ Purwanto, Suharyadi. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

¹¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 185.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

1. Profil dan Gambaran Provinsi Sumatera Utara

Di zaman pemerintahan Belanda, Sumatera merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement Van Sumatera*, yang meliputi Sumatera, dikepalai oleh seorang *Gouverneur* berkedudukan di Medan. Sumatera terdiri dari daerah-daerah administratif yang dinamakan keresidenan.¹

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintah yaitu Provinsi Sumatera yang dikepalai oleh seorang gubernur dan terdiri dari daerah-daerah administratif keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND) Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu keresidenan Aceh, keresidenan Sumatera Timur, dan keresidenan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan

¹Badan Pusat Statistik, *Sumatera-Utara-Dalam-Angka-2015* di akses 25 Agustus 2017, 16:26 WIB, hlm. 65.

mengurus rumah tangganya sendiri yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, diadakanlah reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Perubahan demikian ini ditetapkan dengan keputusan pemerintah Darurat R.I tanggal 16 Mei 1949 No. 21/Pem/P.D.R.I, yang diikuti Keputusan Pemerintah Darurat R.I tanggal 17 Mei 1949 No. 22/Pem/P.D.R.I, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk daerah otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi Provinsi Aceh.²

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1°-4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur, Luas dataran Provinsi Sumatera Utara 72,981 dan 23 Km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- a. Pesisir Timur
- b. Pegunungan Bukit Barisan
- c. Pesisir Barat

²*Ibid.*, hlm. 67.

d. Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam Provinsi yang Sumatera's Oostkust paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Pada masa klonial Hindia-Belanda, wilayah ini termasuk *Residentie Sumatra's Oostkust* bersama Provinsi Riau.

Di wilayah tengah Provinsi berjajar pegunungan bukit barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar danau toba dan pulau samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Untuk mengetahui 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel IV.1 di bawah ini.³

Tabel IV. 1
Kabupaten/Kota & Pusat Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan
1	Kabupaten Nias	Gunungsitoli
2	Kabupaten Mandailing Natal	Panyabungan
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan
5	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung
6	Kabupaten Toba Samosir	Pangururan
7	Kabupaten Labuhan Batu	Rantau Parapat
8	Kabupaten Asahan	Kisaran
9	Kabupaten Simalungun	Raya
10	Kabupaten Dairi	Sidikalang
11	Kabupaten Karo	Kabanjahe
12	Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam
13	Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam
14	Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul
15	Kabupaten Pakpak Bharat	Salak
16	Kabupaten Samosir	Balige
17	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah

³*Ibid.*, hlm. 68.

18	Kabupaten Batubara	Limapuluh
19	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua
20	Kabupaten Padang Lawas	Sibuhuan
21	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang
22	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan
23	Kabupaten Nias Utara	Lotu
24	Kabupaten Nias Barat	Lahomi
25	Kabupaten Langkat	Stabat
26	Kota Sibolga	Sibolga
27	Kota TanjungBalai	TanjungBalai
28	Kota Pematangsiantar	Pematangsiantar
29	Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi
30	Kota Medan	Medan
31	Kota Binjai	Binjai
32	Kota Padangsidimpuan	Padangsidimpuan
33	Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli

Sumber: BPS.

Pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terletak di Kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk kedalam Provinsi Sumatera sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks keresidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh. Sumatera Utara dibagi kepada 25 Kabupaten, 8 Kota (dahulu kotamadya), 325 Kecamatan, dan 5.456 Kelurahan/Desa.⁴

2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara

a. Visi

Menjadi Provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera.

b. Misi

- 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religious dan berkompentensi tinggi.

⁴*Ibid.*, hlm. 68.

- 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*)

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah merupakan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. PAD merupakan salah satu aspek penting dalam pembiayaan belanja di suatu daerah otonom, dimana daerah yang dikatakan sudah mampu atau mandiri dalam mengurus daerahnya secara fiskal dan keuangannya. Maka daerah tersebut sudah dapat menjalankan tujuan dari undang-undang tentang otonomi daerah tersebut. Namun di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara terdapat banyak daerah yang PAD nya rendah, sehingga pemerintah pusat masih membantu dalam membiayai APBD daerah tersebut. Untuk mengetahui perkembangan PAD di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV. 2
PAD Kabupaten/Kota Sumatera Utara
Tahun 2017 (Juta Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah
1	Kab. Asahan	107.890.187
2	Kab. Dairi	66.344.330
3	Kab. Deli Serdang	662.615.775
4	Kab. Tanah Karo	104.000.000
5	Kab. Labuhan Batu	163.989.690
6	Kab. Langkat	131.076.423
7	Kab. Mandailing Natal	100.111.769
8	Kab. Nias	77.222.210
9	Kab. Simalungun	213.789.585
10	Kab. Tapanuli Selatan	81.435.846
11	Kab. Tapanuli Tengah	72.369.935
12	Kab. Tapanuli Utara	94.623.508
13	Kab. Toba Samosir	44.367.570
14	Kota Binjai	98.283.092
15	Kota Medan	1.973.780.338
16	Kota Pematang Siantar	116.508.915
17	Kota Sibolga	78.454.412
18	Kota Tanjung Balai	65.315.421
19	Kota Tebing Tinggi	97.353.698
20	Kota Padang Sidempuan	91.296.998
21	Kab. Pakpak Barat	24.297.176
22	Kab. Nias Selatan	14.160.411
23	Kab. Humbang Hasundutan	41.679.310
24	Kab. Serdang Bedagai	102.479.860
25	Kab. Samosir	50.000.000
26	Kab. Batu Bara	51.590.500
27	Kab. Padang Lawas	52.299.754
28	Kab. Padang Lawas Utara	35.150.441
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	41.169.542
30	Kab. Labuhanbatu Utara	43.182.972
31	Kab. Nias Utara	32.005.000
32	Kab. Nias Barat	28.740.000
33	Kota Gunung Sitoli	34.937.400

Sumber : www.Dirjen-Perimbangan-RI, data diolah

Berdasarkan Tabel IV.2 dapat kita lihat bahwa, PAD dari 33 Kabupaten/Kota tahun 2017. Jumlah PAD tertinggi terdapat pada Kota Medan sebesar Rp. 1.973.780.338 Juta. Nilai PAD tertinggi kedua terdapat pada Kabupaten Deli Serdang dengan nilai Rp. 662.615.775 Juta dan daerah yang PAD nya paling rendah terdapat pada Kabupaten Pakpak Barat serta Nias Selatan dimana berjumlah Rp. 24.297.176 Juta dan Rp. 14.160.411. Dari keseluruhan PAD masih kurang nilainya dalam menutupi anggaran Belanja masing-masing daerah. Sehingga PAD masih belum mampu menutupi belanja daerah secara optimal. Sehingga dana bantuan dari pemerintah Provinsi atau pusat masih di butuhkan oleh keseluruhan daerah di Sumatera Utara bahkan Ibukotanya juga masih belum mampu menutupi Belanja Daerahnya hanya dengan PAD saja. Begitu juga dengan dengan kota-kota besar di Sumatera Utara yang lainnya.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana yang dialokasikan dari APBN sekurang-kurangnya 25 persen dari APBN, serta bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Namun pada permasalahannya daerah terlanjur mengandalkan dana

alokasi tersebut sehingga tidak serius dalam menggali potensi penerimaan daerahnya, tidak selamanya pemerintah bisa menutupi APBD di daerah. Sehingga ini merupakan suatu permasalahan yang harus di selesaikan oleh pemerintah daerah itu sendiri agar dapat mandiri secara keuangannya serta mampu mengurus kebijakan fiskal di daerahnya, untuk itu sekali lagi peran daripada Pendapatan Asli Daerah sangat dibutuhkan dalam situasi dewasa ini. Berikut ini perkembangan Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

Tabel IV. 3
DAU Kabupaten/Kota Sumatera Utara 2017 (Juta Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum
1	Kab. Asahan	955.691.774
2	Kab. Dairi	657.581.285
3	Kab. Deli Serdang	1.603.084.535
4	Kab. Tanah Karo	792.406.517
5	Kab. Labuhan Batu	696.646.309
6	Kab. Langkat	1.287.427.165
7	Kab. Mandailing Natal	788.477.434
8	Kab. Nias	442.479.925
9	Kab. Simalungun	1.297.673.223
10	Kab. Tapanuli Selatan	654.669.272
11	Kab. Tapanuli Tengah	633.513.831
12	Kab. Tapanuli Utara	650.827.006
13	Kab. Toba Samosir	557.421.053
14	Kota Binjai	574.469.158
15	Kota Medan	1.611.940.995
16	Kota Pematang Siantar	593.532.667
17	Kota Sibolga	412.805.887
18	Kota Tanjung Balai	418.850.996
19	Kota Tebing Tinggi	428.475.763
20	Kota Padang Sidempuan	507.686.451
21	Kab. Pakpak Barat	342.284.663
22	Kab. Nias Selatan	543.052.446
23	Kab. Humbang Hasundutan	571.801.064
24	Kab. Serdang Bedagai	774.457.677

25	Kab. Samosir	476.191.394
26	Kab. Batu Bara	646.547.539
27	Kab. Padang Lawas	525.591.211
28	Kab. Padang Lawas Utara	572.675.409
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	513.547.168
30	Kab. Labuhanbatu Utara	593.232.429
31	Kab. Nias Utara	411.036.299
32	Kab. Nias Barat	347.545.033
33	Kota Gunung Sitoli	434.259.520

Sumber : www.Dirjen-Perimbangan-RI, data diolah,

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas DAU di 33 Kabupaten/Kota memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan PAD. Kota Medan merupakan jumlah DAU tertinggi sebesar Rp. 1.611.940.995 Juta. Nilai tertinggi kedua ada pada Kabupaten Deli Serdang Rp. 1.603.084.535 Juta dan nilai DAU terendah terdapat di Kab. Pakpak Barat Rp. 342.284.663 Juta. Ini juga merupakan suatu masalah dalam tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dimana Kota yang paling besar di Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai DAU yang paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten atau daerah lainnya.

Ekspektasi yang diharapkan nilai DAU di Kabupaten lebih besar dibandingkan di Kota, karena infrastruktur di Kabupaten lebih sedikit serta lebih membutuhkan pembangunan agar dapat menggali potensi daerahnya serta dapat menggerakkan roda perekonomian dibandingkan dengan kota seperti halnya di Kota Medan yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai serta perekonomian yang lebih baik.

3. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah

daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain.

Salah satu penyebab kenaikan Belanja daerah yaitu belanja rutin yang seharusnya dikurangi dan menambah alokasi dana untuk belanja investasi serta pembangunan infrastruktur agar roda perekonomian di daerah lebih termobilisasi. Serta dana yang dialokasikan untuk menggali potensi ekonomi masing-masing daerah yang berbeda-beda, bukan untuk menambah gaji, fasilitas, gedung serta mobil dinas pegawai khususnya bapak-bapak wakil rakyat yang terhormat yang biasa hidup mewah dengan uang rakyat, agar dapat hidup lebih sederhana lagi. Sehingga kami rakyat kecil yang selalu dibawah garis kemiskinan dapat diperhatikan agar berkembang baik secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Berikut ini data dari Belanja Daerah pada tahun 2017.

Tabel IV. 4
Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara
Tahun 2017(Juta Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Belanja Daerah
1	Kab. Asahan	1.550.420.215
2	Kab. Dairi	1.125.323.136
3	Kab. Deli Serdang	3.497.039.137
4	Kab. Tanah Karo	1.388.779.449
5	Kab. Labuhan Batu	1.357.678.632
6	Kab. Langkat	2.238.385.764
7	Kab. Mandailing Natal	1.563.819.372
8	Kab. Nias	884.079.808
9	Kab. Simalungun	2.304.907.688
10	Kab. Tapanuli Selatan	1.191.928.498
11	Kab. Tapanuli Tengah	1.091.824.630
12	Kab. Tapanuli Utara	1.198.948.378
13	Kab. Toba Samosir	1.135.016.088
14	Kota Binjai	914.618.290
15	Kota Medan	5.493.560.943
16	Kota Pematang Siantar	1.063.470.020
17	Kota Sibolga	631.329.596
18	Kota Tanjung Balai	693.917.029
19	Kota Tebing Tinggi	737.568.472
20	Kota Padang Sidempuan	836.868.161
21	Kab. Pakpak Barat	681.429.146
22	Kab. Nias Selatan	1.147.761.807
23	Kab. Humbang Hasundutan	983.547.634
24	Kab. Serdang Bedagai	1.386.104.799
25	Kab. Samosir	902.089.052
26	Kab. Batu Bara	1.063.041.449
27	Kab. Padang Lawas	1.096.235.641
28	Kab. Padang Lawas Utara	1.177.450.468
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	878.749.129
30	Kab. Labuhanbatu Utara	849.301.959
31	Kab. Nias Utara	775.830.169
32	Kab. Nias Barat	652.595.950
33	Kota Gunung Sitoli	723.761.500

Sumber : Dirjen Keuangan RI, data diolah

Berdasarkan Tabel IV.4 nilai Belanja Daerah masih tinggi dibandingkan dengan nilai PAD dan DAU dimana penyebab utamanya

yaitu bertambahnya kebutuhan untuk menutupi Belanja Daerah baik berupa Belanja Rutin dan Belanja Modal dari tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Belanja Daerah yang paling tinggi juga masih terpusat di Kota Medan ditahun 2017 sebesar Rp. 5.493.560.943 Juta dan nilai Belanja Daerah tertinggi kedua berada di. Nilai Belanja Daerah yang tinggi disebabkan karena pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara berada di Kota Medan, namun Belanja Daerah yang tinggi seharusnya ada di daerah Kabupatennya karena masih membutuhkan pembangunan infrastruktur juga masih membutuhkan dana investasi untuk perekonomian agar dapat bertumbuh seperti halnya di Ibukota Sumatera Utara.

Sehingga asas desentralisasi dan keadilan sosial dapat merata serta ketimpangan ekonomi dapat teratasi, distribusi kekayaan juga tidak terpusat di kota-kota besar saja, namun merata ke seluruh daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara yang masih tertinggal. Belanja Daerah yang paling rendah terdapat pada Kota Sibolga dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 631.329.596 Juta. Namun Belanja Daerah Phakpak Barat masih jauh jika dibandingkan dengan Belanja daerah di Ibukota. Ekspektasi yang yang diharapkan daerah Kabupaten harusnya juga memiliki nilai Belanja Daerah yang tinggi, agar tidak selalu tertinggal baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, fasilitas atau infrastruktur publik dan pelayanan publik lainnya dengan kota-kota besar di Sumatera Utara.

C. Hasil Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. Pengujian ini juga bertujuan agar mengetahui apakah model regresi berganda yang digunakan sudah berdistribusi normal atau mendekati normal. Analisis pada pengujian ini melalui uji Kolmogorov Smirnov terhadap masing-masing variabel. Dengan ketentuan :

$P \text{ value} > 0,05 = \text{terima } H_a$, artinya data berdistribusi normal.

$P \text{ value} < 0,05 = \text{terima } H_0$, artinya data tidak berdistribusi normal.

Juga melalui grafik penyebaran data pada normal P Plot of Regression Standardized Residual variabel independen. Berikut ini adalah hasil uji Normalitas data dengan analisis grafik Normal Probability Plot. Dengan ketentuan sebaran titik-titiknya menyebar di sekitar garis diagonal maka datanya berdistribusi normal. Berikut ini hasil ujinya :

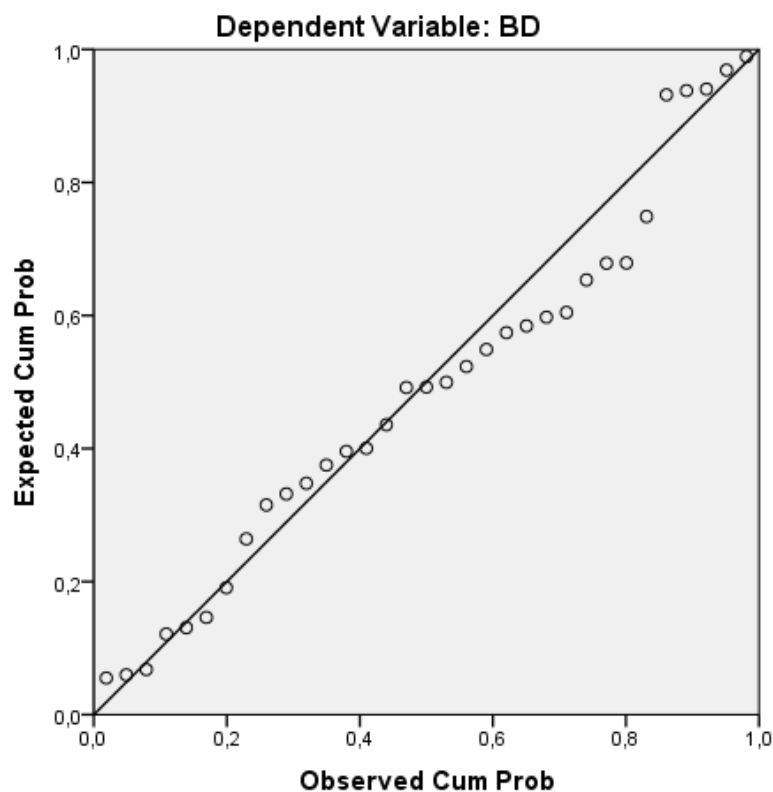
Tabel IV. 5 Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)

		PAD	DAU	BD
N		33	33	33
Normal	Mean	151288547,515	676299487,818	130961763
Parameters ^{a,b}		2	2	6,6364
	Std. Deviation	345291211,464	326344536,882	943404763
		19	67	,74080
Most Extreme	Absolute	,402	,250	,285
Differences	Positive	,402	,250	,285
	Negative	-,346	-,153	-,236
Test Statistic		,402	,250	,285
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c	,000 ^c	,000 ^c

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov pada tabel IV.5 diatas diperoleh besarnya nilai Test Statistic atau nilai Absolutnya, $p = 0,402 ; 0,250 ; 0,285 > 0,05$ dari uji ini dapat diketahui bahwa H_0 ditolak yang berarti sebaran datanya berdistribusi normal.

Gambar IV. 1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan hasil Gambar IV.1 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik sebaran data menyebar disekitar garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian dengan gambar pada Normal Probability Plot berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain

dalam satu model. Jika terdapat korelasi (hubungan) yang tinggi antar variabel bebasnya, maka model regresinya akan terganggu ataupun tidak dapat lagi membedakan mana yang bertindak sebagai variabel bebas dan mana yang bertindak sebagai variabel terikatnya. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dimana jika :

- Jika nilai Tolerance lebih $> 0,10$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.
- Jika nilai Tolerance $< 0,10$ maka artinya terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.

Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor)

- Jika nilai VIF $< 10,00$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas pada data yang diuji
- Jika nilai VIF $> 10,00$ maka dapat dikatakan bahwa terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.

Berikut ini adalah hasil dari uji Multikolinieritasnya :

Tabel IV. 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	50681144,691	51346456,226		,987	,332		
PAD	1,500	,077	,549	19,394	,000	,505	1,982
DAU	1,526	,082	,528	18,650	,000	,505	1,982

Berdasarkan Tabel IV.6, hasil uji Multikolinieritas diperoleh nilai Tolerance dari PAD dan DAU $0,505 > 0,10$ dan nilai VIF $1,982 < 10,00$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinieritas antara kedua

variabel bebasnya ataupun tidak terjadi korelasi (hubungan) yang erat sesama variabel bebasnya serta dapat menentukan dimana yang bertindak sebagai variabel bebas serta mana yang bertindak sebagai variabel terikatnya.

4. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat sebaran data yang tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Alangkah baiknya jika data yang diuji sebaran datanya bersifat sama, sehingga dalam pengujian atau pengukuran data tersebut lebih mudah. Karena jika datanya tidak sama akan susah dalam menganalisisnya. Pada kesempatan ini uji statistik yang digunakan adalah Uji Scatterplot dan Uji koefisien korelasi Spermans Rho, Dengan dasar pengambilan keputusan :

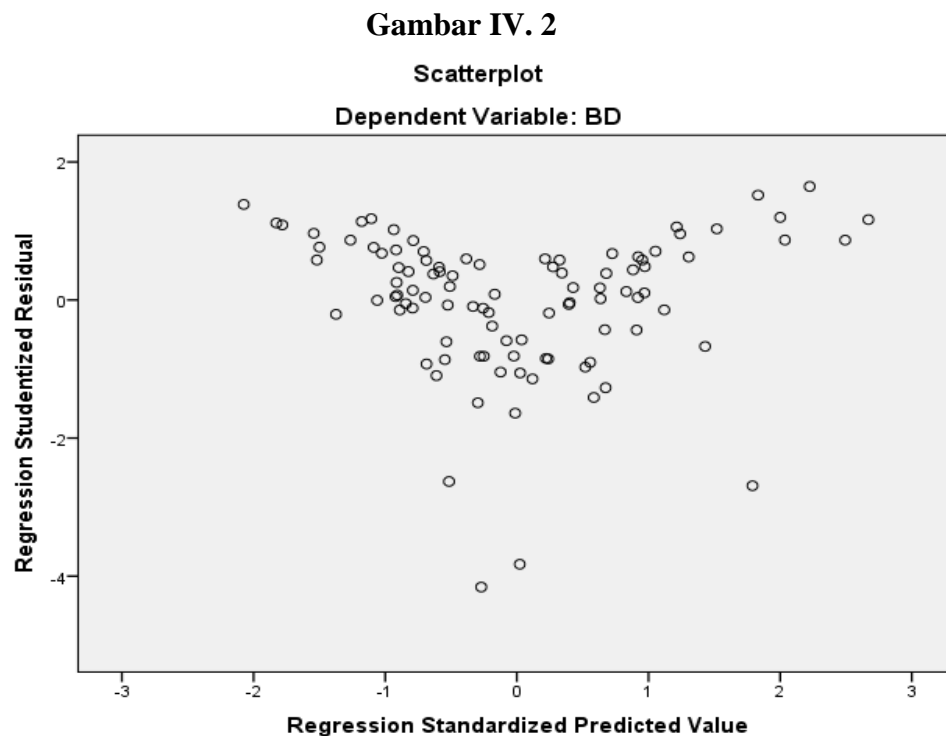
- Jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikansi lebih dari $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.
- Jika korelasi variabel independennya dengan residual didapat signifikansi kurang dari $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terjadi masalah heterokedastisitas.
- Pada uji Scatterplot dengan melihat grafik plot antara lain nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID

Berikut ini hasil uji dari koefisien korelasi Spearman's Rho :

Tabel IV. 7 Hasil Uji Heterokedastisitas

			PAD	DAU	Unstandar dized Residual
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1,000	,751**	-,317
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,072
	N		33	33	33
	DAU	Correlation Coefficient	,751**	1,000	-,059
Sig. (2-tailed)			,000	.	,742
N		33	33	33	
Unstandardized Residual		Correlation Coefficient	-,317	-,059	1,000
	Sig. (2-tailed)		,072	,742	.
	N		33	33	33

Berdasarkan Hasil Uji Spermans' Rho pada tabel IV.7 diatas, diperoleh nilai Unstandardized Residual pada PAD 0,072 dan nilai DAU 0,742 dimana lebih dari $> 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak mengandung adanya Heterokedastisitas.



Kemudian berdasarkan Gambar IV.2, sebaran titik-titik (plot) tidak memiliki pola serta titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka kesimpulannya tidak terjadi Heterokedastisitas pada model regresi ini.

6. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai D statistik. Salah satu pengujian yang

digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DW test. Berikut ini adalah hasil Uji Autokorelasi dengan uji statistik Durbin Watson :

Tabel IV. 8 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,994 ^a	,988	,987	107296451,42179	1,644

Hasil uji Autokorelasi pada tabel IV.8 diatas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar $D = 1,644$ dengan jumlah unit analisis $n = 33$ dan jumlah variabel bebas $k = 2$, dari tabel Durbin Watson maka diperoleh nilai $d_l = 1,321$ dan nilai $d_u = 1,577$. Maka diperoleh hasil :

- $d < d_l = 1,644 > 1,321 \Rightarrow$ Tidak terjadi masalah autokorelasi yang positif dan perlu perbaikan.
- $d > d_u = 1,644 > 1,577 \Rightarrow$ Tidak ada autokorelasi positif.
- $d_l < d < d_u = 1,321 > 1,644 > 1,577 \Rightarrow$ Tidak Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik.
- $4 - d_u < d < 4 - d_l = 2,423 > 1,644 < 2,679 \Rightarrow$ Tidak ada Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik.
- $4 - d_l < d = 2,679 > 1,644 \Rightarrow$ Tidak ada masalah autokorelasi serius.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif pada penelitian ini.

7. Analisis Regresi Berganda

Uji Regresi ini bertujuan untuk mengetahui persamaan yang diperoleh dari tabel *coefficient*, kemudian dari analisis ini akan

diperoleh nilai koefisien dari variabel–variabel Independennya serta memperoleh nilai konstanta dari persamaannya. Kemudian menginterpretasikan hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikatnya dengan kata lain melihat kekuatan hubungan antar variabelnya. Berikut ini hasil uji analisisnya :

Tabel IV. 9 Hasil Uji Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	50681144,691	51346456,226		,987	,332
PAD	1,500	,077	,549	19,394	,000
DAU	1,526	,082	,528	18,650	,000

Berdasarkan tabel IV.9 diatas diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$BD = 50.681.144,691 + 1,5 PAD + 1,526 DAU + e$$

- a. Nilai konstanta sebesar Rp. 50.681.144,691 Juta sehingga apabila variabel PAD dan DAU bernilai 0 maka anggaran dari Belanja daerah bernilai positif sebesar Rp. 50.681.144,691 Juta. Kecuali dipengaruhi oleh variabel e (variabel yang mempengaruhi di luar model regresi pada penelitian ini, seperti DAK, DBH dan lainnya).
- b. Nilai PAD Rp. 1.500.000 Juta menunjukkan pengaruh positif terhadap Belanja daerah. Sehingga, Jika nilai koefisien variabel PAD bertambah 1 persen maka nilai dari Belanja Daerah akan naik sebesar Rp. 1.500.000 Juta.

- c. Nilai DAU Rp. 1.526.000 Juta menunjukkan pengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sehingga apabila nilai DAU bertambah maka akan bertambah pula nilai dari Belanja Daerah. Jika nilai koefisien variabel DAU bertambah 1 persen maka nilai dari Belanja daerah akan naik sebesar Rp. 1.526.000 Juta.

8. Uji Statistik - t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial ataupun untuk menguji apakah asumsi dari hipotesis dapat diterima. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel IV.10 sehingga dapat disimpulkan bahwa :

Tabel IV. 10 Hasil Uji - t

Model	T – Tabel	T- Hitung	Sig.
PAD	2,034	19,394	,000
DAU	2,034	18,650	,000

- a. Penentuan hipotesis berdasarkan nilai t maka H_0 ditolak dan H_a diterima untuk variabel PAD karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($19,394 > 2,034$), (dilihat pada t_{tabel} N 33 dengan taraf signifikan 0,05). Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara tahun 2017.
- b. Berdasarkan nilai signifikan H_0 ditolak dan H_a diterima, karena nilai signifikan $0,00 < 0,05$. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara tahun 2017.

- c. Penentuan hipotesis berdasarkan nilai t maka H_0 ditolak dan H_a diterima untuk variabel DAU karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($18,650 > 2,034$), (dilihat pada t_{tabel} N 33 dengan taraf signifikan 0,05). Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara DAU dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara tahun 2017.
- d. Berdasarkan nilai signifikan H_0 ditolak dan H_a diterima, karena nilai signifikan $0,00 < 0,05$. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara DAU dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara tahun 2017.

9. Uji Statistik - F

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan ketentuan :

H_0 : Pad dan dau secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

H_a : Pad dan dau secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak .

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima.

Hasil Uji Statistik F dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel IV. 11 Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2813502568933 1773000,000	2	140675128446658 87000,000	1221,931	,000 ^b
Residual	3453758546312 30400,000	30	115125284877076 80,000		
Total	2848040154396 3005000,000	32			

Analisis ujinya sebagai berikut :

F-hitung (P value) 1221,931 > F-Tabel 3,28 dan nilai sign. 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Artinya H_3 dapat diterima, yaitu PAD dan DAU berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah. Jadi model regresi ini dapat memprediksi atau menjelaskan nilai dari Belanja daerah.

10. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut ini hasil Analisis Uji determinasi:

Tabel IV. 12 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,994 ^a	,988	,987	107296451,4	,988	1221,931	2	30	,000

Dari tabel IV.12 diperoleh besar hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan (bersama) 0,988 dengan nilai signifikansi probabilitasnya < 0,05 nilai tersebut menunjukkan hubungannya sangat kuat, sedangkan kontribusi secara bersama (koefisien determinasi) 98,8 %

sedangkan 1,2 % lagi di pengaruhi variabel diluar model regresi. Sehingga kesimpulannya berhubungan secara simultan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja daerah

Analisis regresi serta Uji t pada variabel PAD juga menunjukkan pengaruhnya terhadap Variabel Belanja Daerah. Nilai t_{hitung} diperoleh $19,394 > 2,034$ nilai t-tabel dengan signifikansi probabilitas $0,00 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap anggaran Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini mereplikasi penelitian Ramadha Puspita Sari (2010) yang menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Daerah. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti dua variabel bebasnya yaitu Belanja Daerah sebagai variabel dependen, DAU dan PAD sebagai variabel independen. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis melalui Regresi berganda. Dari pengujian asumsi klasik, dapat diketahui bahwa uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, maupun uji heteroskedastisitas telah terpenuhi begitu juga analisis regresi bergandanya.

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, didapat bukti empiris yang mendukung hipotesis_a yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Bukti empiris juga mendukung bahwa DAU juga berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah dan juga mempengaruhi variabel Belanja Daerah secara bersama-sama.

Hal ini menegaskan semakin tinggi nilai dari PAD maka akan semakin tinggi pula nilai dari Belanja daerah, memang secara berpengaruh namun realisasi anggaran tersebut masih tanda tanya. Mungkin saja dengan anggaran yang begitu besar untuk suatu daerah tidak sesuai dengan realisasinya. Sehingga setelah anggaran di sahkan diperlukan adanya monitoring atau pengawasan agar anggaran tersebut bukan hanya tinggi dari nilai namun juga tinggi dari segi realisasinya.

2. Pengaruh DAU terhadap Belanja daerah

Analisis regresi serta Uji-t pada variabel DAU juga menunjukkan pengaruhnya terhadap Variabel Belanja Daerah. Nilai t-tabel $18,650 > 2,034$ dengan signifikansi probabilitas $0,00 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan Pemerintah daerah masih cenderung bergantung pada dana transfer pemerintah pusat yaitu dana perimbangan.

Salah satu penyebabnya karena siklus ekonomi negara kita terpusat di daerah jawa saja khususnya di daerah Ibu kota sehingga masih jauh lebih sejahtera warga yang tinggal dan berbisnis di Ibukota dengan kata lain peluang untuk mengembangkan ekonomi masih terpusat di Jawa, belum lagi berbica tentang infrastruktur, sehingga muncullah Gap antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah.

Agar Pemerintah daerah dapat tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu serius mengembangkan PAD baik melalui pajak, menggali potensi sumber daya alam setempat, menggalakkan ekonomi kreatif seperti memadukan ekonomi pariwisata

dengan budaya setempat, memproduktifkan masyarakatnya melalui Industri Rumah dengan menjamin pasar terhadap hasil produksinya dan keuntungan yang jelas terhadap produknya, dan potensi-potensi ekonomi lainnya.

1. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh secara simultan melalui uji koefisien determinasi, dimana diperoleh nilai $R^2 = 0,988$ yaitu variabel PAD dan DAU mempengaruhi secara bersama-sama variabel Belanja Daerah sebesar 98,8%. Koefisien DAU sebesar (1,526) dan koefisien PAD (1,500). Persamaan yang digunakan yaitu :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Hal ini sejalan dengan data di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak daerah masih tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Meskipun otonomi daerah sudah dilakukan selama kurang lebih 12 tahun, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur keuangan dan rumah tangga daerah. Pada tahun 2001, setahun setelah dilakukan otonomi daerah, dari 13 daerah yang diteliti oleh Lembaga Kajian Otonomi Daerah Suara Merdeka (LKOD-SM), tidak ada satu daerah pun yang kontribusi PAD-nya mencapai 10 % dari total APBD (Suara Merdeka, 26 Juli 2005). Beberapa tahun berikutnya, pada tahun 2009, dari 33 provinsi serta 452 kabupaten dan kota yang diteliti, besarnya

PAD suatu daerah pada umumnya hanya dapat menyumbang 7,4 % dari seluruh anggaran Belanja daerah masing-masing.

Data tersebut menunjukkan bahwa 92.6% anggaran Belanja Daerah dibiayai oleh Dana Perimbangan. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum serius dalam mengembangkan PAD dan masih sangat bergantung kepada dana transfer pemerintah pusat.

E. Keterbatasan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, yaitu keterbatasan bahan materi dari skripsi ini, seperti kurangnya buku-buku yang menjelaskan lebih detail tentang judul yang diangkat penulis pada penelitian ini.

Walaupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dan tujuan penelitian. Segala upaya, kerja keras dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya bisa menyempurnakan penelitiannya tersebut, misalnya dengan menambah variabel yang mempengaruhi Belanja daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Daerah.
2. Terdapat pengaruh yang antara variabel Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Daerah.
3. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah..

B. Saran-saran

Adapun saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah, peneliti menyarankan agar pengelolaan dana pajak lebih diawasi serta pendistribusian pajak kepada masyarakat agar lebih merata sehingga pembangunan infrastruktur akan meningkat yang menyebabkan penyaluran barang dari daerah ke daerah lain akan lancar sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja serta akan mengurangi pengangguran. Sebagai mana Rasulullah SAW yang mengelola zakat dalam membangun perekonomian.

2. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih memperluas variabel-variabel independen yang tercantum dalam laporan anggaran keuangan daerah, yang juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja daerah, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Hibah, Dana Sosial dan dana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Edisi Ketiga, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Andre Saptho, “Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Provinsi Maluku Tahun 1994-2009,” dalam Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura, 2010, hlm. 22-23.
- Anjar Setiawan, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Hlm ; 40.
- Arbie gugus wandira. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012)*. Dalam Jurnal : Universitas negeri Semarang.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Kebijakan Lainnya) (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 48.
- Damang, 2011. *Pendapatan Asli Daerah*. Artikel. <http://www.pendapatan-asli-daerah-negara-hukum.com>
- Dina Angraini, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah diakses Selasa 20 Desember 2017 jam 02:20 wib.
- Duwi Priyatno, Op. Cit., hlm. 79. , Op. Cit., hlm. 79. Duwi, *SPSS 22 Pengelohan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014). hlm. 30.
- Dwiarso Utomo, Yulita Setiawan, dan Agung Yulianto, *Perpajakan* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET; Semarang: UDINUS, 2011), hlm.2.
- Fransisca Roosiana kurniawati, *Pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten di indonesia : 2010*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang. Hal. 36
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 27.

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 74
- Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm. 338.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 185.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 251.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm.73.
- Mardiasmo, *Perpajakan* (yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 1
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 76.
- _____, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 138.
- Muhammad Ali Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 66.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),
- Nachrowi, N. Djalal dan Hardius Usman (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Islam, Economics and Society)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Kediri: Pustaka Pelajar, 2010), Cet.1, hal.17-23.
- Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro ekonomi & Makro ekonomi)* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, 2008), hlm. 445.

- Purwanto, Suharyadi. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ririn, Gurning. 2011. *Tugas Dana Alokasi Umum dan Laporan Realisasi Anggaran*. <http://www.edublogs.riringurning.com>. Diakses pada 22 Desember 2017. Pukul 20.30.
- Sirait, Robby Alexander. 2009. *Desentralisasi fiskal Dana Alokasi Umum*. <http://www.bloggersumut.robbyalexandersirait.com>. Diakses pada 19 desember 2017. Pukul 19.00. Hlm ; 20
- Sugianto, *Pajak & Retribusi daerah (Pengelolaan Pemerintahan Daerah dalam aspek Keuangan, Pajak & Retribusi Daerah)*, Jakarta:Grasindo,2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 80.
- Undang-Undang No. 32-33 Tahun 2004.*
- UU No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6.*
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007.*
- [Www.Dirjen-Perimbangan-Keuangan-RI.go.id](http://www.Dirjen-Perimbangan-Keuangan-RI.go.id).
- Www.Kompasiana.com,*Penelitian Terdahulu*, diakses kamis,22:00 wib.
- Www.Suaramerdeka.com. (diakses : 22/12/2017, jam : 09;38).
- Yovita, Farah Marta. 2011. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)*”. Diponegoro Jurnal Of Accounting. Semarang: UNDIP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Faisal Abdaoe. R
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, tanggal lahir : Padangsidimpuan, 18 Januari 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Lintas Sibolga, Km.10, Desa sitaratoit, Kec. Angkola Barat, Kab. Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Telepon/No. HP : 0823 7029 2724
E-mail : Ritonga.f@yahoo.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Yahya Ritonga. S.Pd
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu : Rosmaini Rangkuti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2001-2007 : SD Negeri 200111/16 Padangsidimpuan Utara
Tahun 2007-2010 : SMP Swasta Nurul Ilmi Padangsidimpuan Selatan
Tahun 2010-2013 : SMA Negeri 5 Padangsidimpuan Selatan
Tahun 2013-2017 : Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Lampiran 1**DAFTAR DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN
BELANJA DAERAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2017**

No.	Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Belanja Daerah
1	Kab. Asahan	107.890.187	955.691.774	1.550.420.215
2	Kab. Dairi	66.344.330	657.581.285	1.125.323.136
3	Kab. Deli Serdang	662.615.775	1.603.084.535	3.497.039.137
4	Kab. Karo	104.000.000	792.406.517	1.388.779.449
5	Kab. Labuhanbatu	163.989.690	696.646.309	1.357.678.632
6	Kab. Langkat	131.076.423	1.287.427.165	2.238.385.764
7	Kab. Mandailing Natal	100.111.769	788.477.434	1.563.819.372
8	Kab. Nias	77.222.210	442.479.925	884.079.808
9	Kab. Simalungun	213.789.585	1.297.673.223	2.304.907.688
10	Kab. Tapanuli Selatan	81.435.846	654.669.272	1.191.928.498
11	Kab. Tapanuli Tengah	72.369.935	633.513.831	1.091.824.630
12	Kab. Tapanuli Utara	94.623.508	650.827.006	1.198.948.378
13	Kab. Toba Samosir	44.367.570	557.421.053	1.135.016.088
14	Kota Binjai	98.283.092	574.469.158	914.618.290
15	Kota Medan	1.973.780.338	1.611.940.995	5.493.560.943
16	Kota Pematang Siantar	116.508.915	593.532.667	1.063.470.020
17	Kota Sibolga	78.454.412	412.805.887	631.329.596
18	Kota Tanjung Balai	65.315.421	418.850.996	693.917.029
19	Kota Tebing Tinggi	97.353.698	428.475.763	737.568.472
20	Kota Padang Sidempuan	91.296.998	507.686.451	836.868.161
21	Kab. Pakpak Bharat	24.297.176	342.284.663	681.429.146
22	Kab. Nias Selatan	14.160.411	543.052.446	1.147.761.807
23	Kab. Humbang Hasundutan	41.679.310	571.801.064	983.547.634
24	Kab. Serdang Bedagai	102.479.860	774.457.677	1.386.104.799
25	Kab. Samosir	50.000.000	476.191.394	902.089.052
26	Kab. Batu Bara	51.590.500	646.547.539	1.063.041.449
27	Kab. Padang Lawas	52.299.754	525.591.211	1.096.235.641
28	Kab. Padang Lawas Utara	35.150.441	572.675.409	1.177.450.468
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	41.169.542	513.547.168	878.749.129
30	Kab. Labuhanbatu Utara	43.182.972	593.232.429	849.301.959
31	Kab. Nias Utara	32.005.000	411.036.299	775.830.169
32	Kab. Nias Barat	28.740.000	347.545.033	652.595.950
33	Kota Gunungsitoli	34.937.400	434.259.520	723.761.500

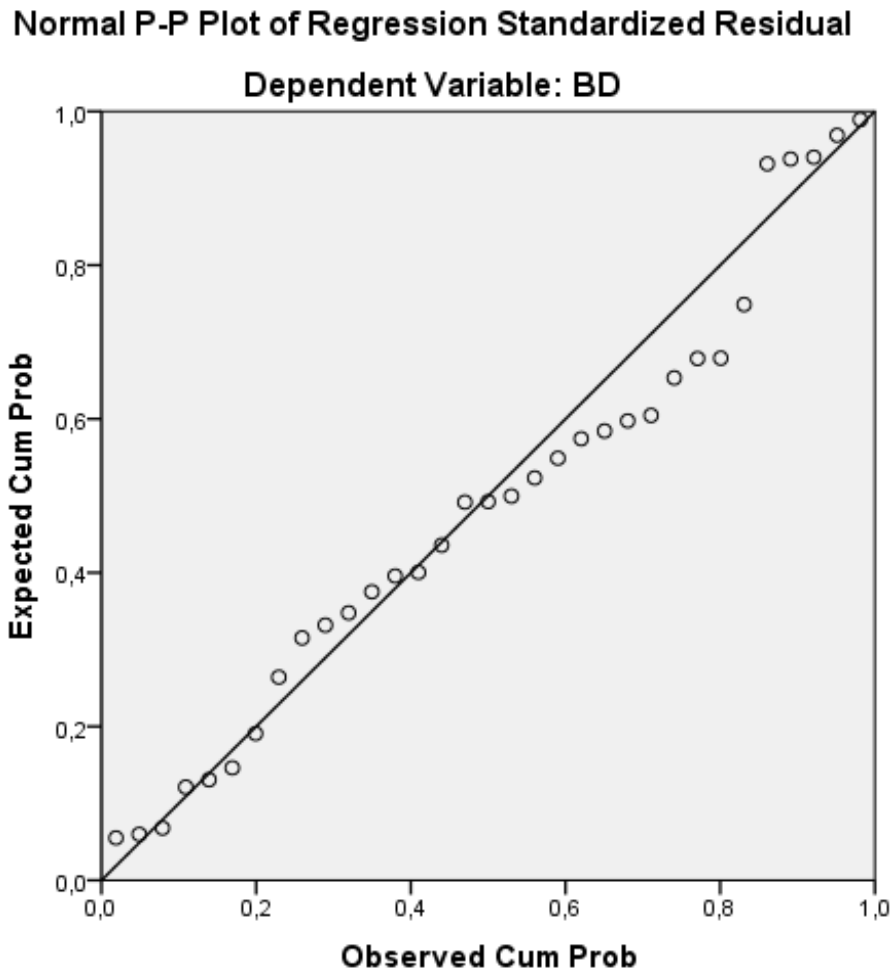
Lampiran 2

HASIL UJI NORMALITAS (*KOLMOGROV SMIRNOV*)

		PAD	DAU	BD
N		33	33	33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	151288547,515	676299487,818	1309617636,6364
	Std. Deviation	2	2	943404763,74080
Most Extreme Differences	Absolute	19	67	
	Positive	,402	,250	,285
	Negative	,402	,250	,285
Test Statistic		-,346	-,153	-,236
Asymp. Sig. (2-tailed)		,402	,250	,285
		,000 ^c	,000 ^c	,000 ^c

Lampiran 3

HASIL UJI NORMAL PROBABILITY P- PLOT



Lampiran 4

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	50681144,691	51346456,226		,987	,332		
PAD	1,500	,077	,549	19,394	,000	,505	1,982
DAU	1,526	,082	,528	18,650	,000	,505	1,982

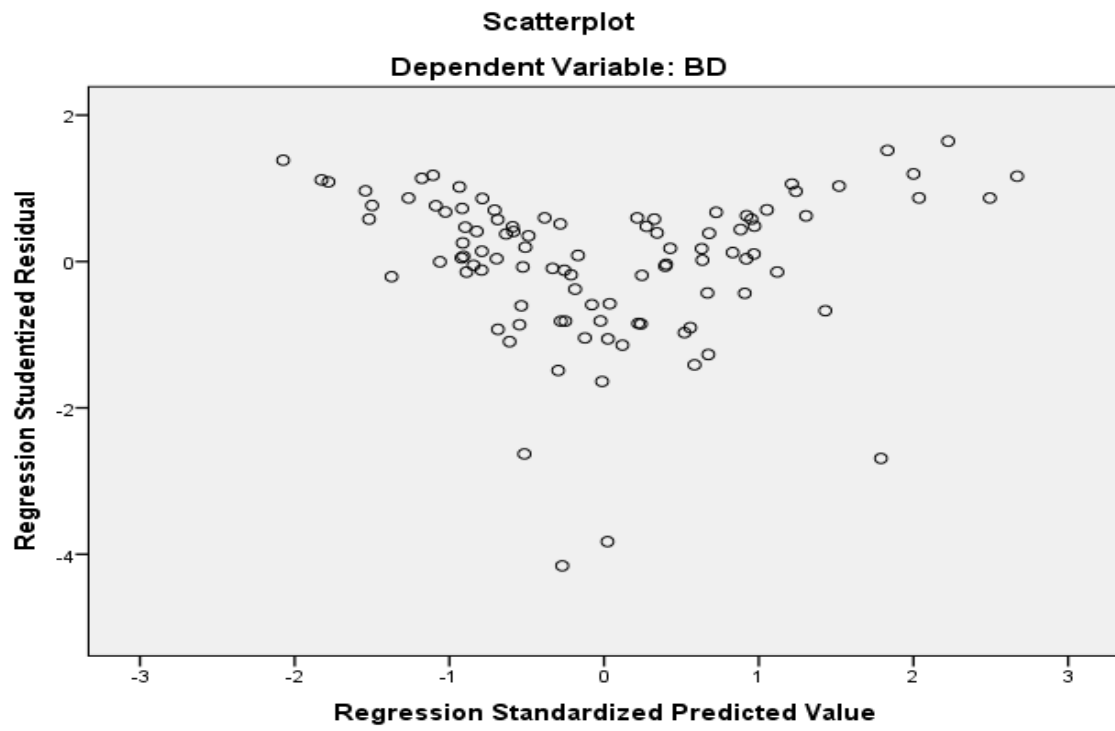
Lampiran 5

HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS (*SPEARMAN'S RHO*)

			PAD	DAU	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1,000	,751**	-,317
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,072
		N	33	33	33
	DAU	Correlation Coefficient	,751**	1,000	-,059
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,742
		N	33	33	33
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-,317	-,059	1,000
		Sig. (2-tailed)	,072	,742	.
		N	33	33	33

Lampiran 6

HASIL UJI GRAFIK SCATTERPLOT (UJI HETEROKEDASTISITAS)



Lampiran 7

HASIL UJI AUTOKORELASI (DURBIN WATSON)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,994 ^a	,988	,987	107296451,42179	1,644

Lampiran 8

HASIL UJI ANALISIS REGRESI BERGANDA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	50681144,691	51346456,226		,987	,332
	PAD	1,500	,077	,549	19,394	,000
	DAU	1,526	,082	,528	18,650	,000

Lampiran 9

HASIL UJI t – STATISTIK

Model	T – Tabel	T- Hitung	Sig.
PAD	2,034	19,394	,000
DAU	2,034	18,650	,000

Lampiran 10

HASIL UJI F – STATISTIK

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	28135025689331773 000,000	2	14067512844665887000, 000	1221,931	,000 ^b
Residual	34537585463123040 0,000	30	11512528487707680,000		
Total	28480401543963005 000,000	32			

Lampiran 11

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,994 ^a	,988	,987	107296451,4	,988	1221,931	2	30	,000